

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam konteks administrasi publik, pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Proses ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kebijakan yang dihasilkan dan bagaimana kebijakan tersebut diterima serta diimplementasikan oleh Masyarakat. proses pengambilan keputusan di sektor publik semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan dalam dinamika sosial, politik, serta teknologi informasi yang terjadi dengan cepat. Salah satu fenomena yang muncul adalah pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada.

Kepemimpinan kolaboratif merupakan pendekatan yang menekankan kerja sama, komunikasi terbuka, dan partisipasi berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam implementasinya di lingkungan birokrasi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, pendekatan ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih kuatnya budaya kepemimpinan birokratis yang cenderung top-down, sehingga menghambat terciptanya ruang dialog dan kolaborasi yang sejati.

Pada Bakesbangpol Kota Bandung, pengambilan keputusan sering kali berkaitan dengan isu sensitif seperti potensi konflik sosial, dinamika politik, serta kerukunan antarumat beragama. Kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan, menyatukan perbedaan kepentingan, dan mengoordinasikan berbagai pihak dalam satu tujuan bersama. Oleh karena itu, keterkaitan antara kepemimpinan kolaboratif dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk dikaji, khususnya dalam melihat bagaimana proses kolaborasi tersebut memengaruhi kualitas, efektivitas, dan legitimasi keputusan yang diambil.

Meskipun Bakesbangpol Kota Bandung telah menerapkan berbagai forum koordinasi, dialog publik, dan kerja sama lintas sektor, dalam praktiknya masih

ditemui tantangan seperti ketimpangan partisipasi, keterbatasan komunikasi dua arah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kepemimpinan kolaboratif dalam pengambilan keputusan belum sepenuhnya berjalan secara ideal dan masih memerlukan penguatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana kepemimpinan kolaboratif diterapkan dalam proses pengambilan keputusan di Bakesbangpol Kota Bandung serta bagaimana keterkaitan keduanya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan kepemimpinan kolaboratif di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam konteks Badan Kesbangpol Kota Bandung, kepemimpinan kolaboratif berperan penting dalam membangun komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut O'Leary dan Bingham (2009), kepemimpinan yang kolaboratif mampu menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih diterima oleh masyarakat.

Meskipun konsep kepemimpinan kolaboratif telah banyak dikaji dalam berbagai sektor, penelitian yang secara khusus mem (O'Leary, (2009)) bahas dinamika kepemimpinan ini dalam proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan, terutama di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), masih terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih berfokus pada penerapannya di sektor swasta, pendidikan, atau organisasi sosial, sementara penerapan kepemimpinan kolaboratif dalam birokrasi pemerintahan, khususnya dalam konteks politik dan stabilitas sosial, masih jarang dieksplorasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian yang dapat diisi dengan menganalisis bagaimana kepemimpinan kolaboratif berperan dalam proses pengambilan keputusan di Kesbangpol Kota Bandung.

Selain itu, banyak penelitian tentang pengambilan keputusan di pemerintahan lebih menitikberatkan pada model kepemimpinan birokratis atau

hierarkis, sedangkan pendekatan kolaboratif masih belum banyak dikaji secara mendalam. Interaksi antar pemimpin serta bagaimana mereka membangun sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial di tingkat daerah menjadi aspek yang belum banyak mendapatkan perhatian dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut yang dapat mengungkap bagaimana kepemimpinan kolaboratif dapat memengaruhi efektivitas proses pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan daerah.

Aspek lain yang juga masih kurang mendapatkan perhatian dalam penelitian terdahulu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan kolaboratif dalam pemerintahan. Sebagian besar kajian sebelumnya hanya membahas konsep kepemimpinan ini dari sisi teoretis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti regulasi, budaya kerja birokrasi, serta tekanan politik yang mungkin berperan dalam keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki peluang untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam menerapkan kepemimpinan kolaboratif dalam pengambilan keputusan di Kesbangpol.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengukur sejauh mana kepemimpinan kolaboratif berkontribusi terhadap kualitas kebijakan publik. Meskipun banyak penelitian menekankan pentingnya kerja sama dalam kepemimpinan, belum banyak yang secara spesifik menilai apakah pendekatan kolaboratif lebih efektif dibandingkan model kepemimpinan lainnya dalam proses perumusan kebijakan di pemerintahan daerah. Dengan menelaah dinamika kepemimpinan kolaboratif di Kesbangpol Kota Bandung, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai efektivitas model kepemimpinan ini dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.

penggunaan teknologi informasi juga semakin memperkuat peran kepemimpinan kolaboratif dalam pengambilan keputusan. (Avolio & Kahai, n.d.) menekankan bahwa teknologi memungkinkan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dalam lingkungan kerja yang kompleks. Implementasi sistem informasi yang mendukung transparansi kebijakan dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan di Badan Kesbangpol Kota Bandung. Studi yang dilakukan oleh ((Denison, 2012) menunjukkan bahwa budaya organisasi juga berperan dalam keberhasilan kepemimpinan kolaboratif. Organisasi yang memiliki budaya terbuka dan inklusif cenderung lebih mudah dalam menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi. Oleh karena itu, pembentukan budaya organisasi yang mendukung partisipasi dan keterbukaan menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di Badan Kesbangpol Kota Bandung.

Dengan demikian, dinamika kepemimpinan kolaboratif dalam pengambilan keputusan di Badan Kesbangpol Kota Bandung mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin organisasi pemerintahan. Melalui pendekatan yang transparan, inklusif, dan berbasis teknologi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam efektivitas suatu organisasi, terutama dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, pendekatan kepemimpinan kolaboratif menjadi semakin relevan karena memungkinkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan (Goleman, (2013))Kepemimpinan kolaboratif melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan dalam organisasi, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

kepemimpinan kolaboratif dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dalam konteks kepemimpinan di Kota Bandung pada tahun 2023 dan 2024. Pergantian kepemimpinan yang terjadi akibat penangkapan Wali Kota Yana Mulyana pada April 2023 menciptakan tantangan dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam situasi ini, Ema Sumarna yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung harus mengadopsi pendekatan kepemimpinan kolaboratif untuk memastikan kelangsungan kebijakan dan pelayanan publik. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat,

aparatur daerah, serta masyarakat, menjadi aspek penting dalam menjaga efektivitas tata kelola kota.

Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam kondisi transisi kepemimpinan menuntut koordinasi yang kuat guna menghindari stagnasi birokrasi. Penunjukan Penjabat Wali Kota Bandung pada September 2024 mencerminkan bagaimana pengambilan keputusan dalam pemerintahan tidak hanya bergantung pada satu individu, tetapi melibatkan berbagai pihak dalam menentukan kepemimpinan yang mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal. Dalam konteks ini, kepemimpinan kolaboratif memainkan peran strategis dalam memastikan kesinambungan program pembangunan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang stabil dan responsif.

Adanya pergantian kepemimpinan tersebut dapat dilihat bagaimana pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2022 - 2023 menunjukkan keberhasilan dalam berbagai sektor, termasuk reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan, *smart city*, keterbukaan informasi, ekonomi lokal, hingga pariwisata. Dengan pencapaian ini, Kota Bandung semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kota terbaik di Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan dan inovasi layanan publik.

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2022-2023

No.	Prestasi	Tahun	Deskripsi
1.	Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2022	Pemkot Bandung meraih opini WTP dari BPK empat kali berturut-turut pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021.
2.	Kategori 'Sangat Baik' dalam Implementasi Sistem Merit	2022	Pemkot Bandung mendapatkan penghargaan kategori 'Sangat Baik' dalam penilaian implementasi sistem merit pada manajemen ASN.

No.	Prestasi	Tahun	Deskripsi
3.	Nilai A untuk SAKIP	2022	Pemkot Bandung mendapat nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022.
4.	Indeks <i>Smart City</i> Tertinggi di Indonesia	2022	Kota Bandung meraih indeks smart city tertinggi di Indonesia dengan skor 3,71 dan dinobatkan sebagai kota terbaik dari 100 Smart City di Indonesia.
5.	Predikat Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik	2022	Pemkot Bandung meraih predikat sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik.
6.	Penghargaan Anugerah Media Humas (AMH)	2022	Pemkot Bandung meraih Terbaik I Kategori Penerbitan Media Internal dan Terbaik II Kategori Media Sosial pada ajang AMH 2022.
7.	Penghargaan Piala Abdibaktitani	2023	Pemkot Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menerima penghargaan tertinggi Piala Abdibaktitani 2023 dari Menteri Pertanian atas inovasi program Buruan Sae.
8.	Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2023	Pemkot Bandung merealisasikan penggunaan produk dalam negeri sekitar Rp1,3 triliun, mencapai 54,4% dari komitmen Rp2,3 triliun.

No.	Prestasi	Tahun	Deskripsi
9.	Juara II Asset Award Jawa Barat	2023	Pemkot Bandung meraih juara II dalam ajang Asset Award 2023 yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Barat.
10.	Predikat A dalam Indeks Reformasi Birokrasi	2023	Pemkot Bandung meraih predikat A (Memuaskan) dengan indeks 83,58 dalam evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PANRB.
11.	Kunjungan Wisatawan Mencapai 7,7 Juta Orang	2023	Kota Bandung mencatat kunjungan wisatawan mencapai 7,7 juta orang pada tahun 2023, didukung oleh berbagai program dan acara.

Sumber: Humas Kota Bandung Tahun 2022-2023 (diolah peneliti 2025)

Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan kinerja yang sangat baik di berbagai sektor, termasuk reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan, *smart city*, serta keterbukaan informasi publik. Prestasi seperti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan predikat "Sangat Baik" dalam sistem merit menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Selain itu, inovasi dalam program ketahanan pangan seperti Buruan SAE serta peningkatan layanan berbasis digital turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2023, pencapaian Kota Bandung semakin kuat dengan meningkatnya kunjungan wisatawan hingga 7,7 juta orang, realisasi penggunaan produk dalam negeri yang mencapai Rp1,3 triliun, serta peringkat tinggi dalam indeks reformasi birokrasi dan pengelolaan aset daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Bandung terus berkembang sebagai kota yang inovatif, maju, dan ramah bagi investasi maupun pariwisata. Dengan berbagai penghargaan dan

pengakuan ini, diharapkan Kota Bandung dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan publik untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Di era digital seperti saat ini, kepemimpinan kolaboratif juga semakin diperkuat oleh teknologi komunikasi yang memungkinkan koordinasi lebih efektif di antara anggota organisasi. (Avolio, (2003)) Teknologi memberikan peluang bagi para pemimpin untuk membangun jaringan kerja yang lebih luas serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti empiris.

kepemimpinan kolaboratif tidak hanya bermanfaat dalam konteks organisasi bisnis, tetapi juga dalam sektor publik dan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa dalam sektor pemerintahan, model kepemimpinan ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan (Ansell C. &, (2007)). Hal ini berimplikasi pada peningkatan legitimasi kebijakan yang diambil karena adanya partisipasi yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan.

Pada tahun 2025, kepemimpinan kolaboratif dalam pengambilan keputusan di Kota Bandung menjadi salah satu pendekatan yang mulai ditekankan pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Pemerintah Kota Bandung berupaya mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti perangkat daerah, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, dan sektor swasta dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keputusan yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, kepemimpinan kolaboratif tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2025 terlihat adanya peningkatan dari sisi keterbukaan dan mekanisme partisipasi. Pemerintah Kota Bandung lebih aktif membuka ruang dialog, musyawarah, serta konsultasi publik, termasuk memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas sebagai bagian dari pendekatan pentahelix. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih cenderung bersifat prosedural. Permasalahan seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, perbedaan kepentingan

antar aktor, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat, serta lambatnya tindak lanjut hasil kesepakatan masih menjadi tantangan utama dalam penerapan kepemimpinan kolaboratif pada masa awal kepemimpinan Wali kota Farhan. Dalam konteks tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Bandung memiliki peran yang strategis dalam mendukung kepemimpinan kolaboratif. Bakesbangpol berperan sebagai fasilitator komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Secara normatif, kepemimpinan kolaboratif dalam pemerintahan merupakan model kepemimpinan yang menempatkan pemimpin bukan sebagai satu-satunya pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang menghubungkan dan mengelola kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan. Dalam pendekatan ini, pemerintah melibatkan aktor non-pemerintah seperti masyarakat, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan sektor swasta dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan publik. Tujuan utamanya adalah menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan memiliki legitimasi yang kuat karena dibangun melalui dialog dan kesepakatan bersama (Ansell C. &, (2008).).

Kepemimpinan kolaboratif yang ideal menuntut adanya keterbukaan, kepercayaan, serta partisipasi yang bermakna antar aktor. Pemimpin dituntut memiliki kemampuan *facilitative leadership*, yaitu mampu mendorong komunikasi dua arah, mengelola perbedaan kepentingan, dan memastikan tindak lanjut dari hasil kolaborasi. (Emerson K. N., (2012).) menekankan bahwa keberhasilan kepemimpinan kolaboratif sangat ditentukan oleh komitmen bersama dan motivasi kolektif, sementara menegaskan pentingnya peran pemimpin dalam menjaga keseimbangan kekuasaan agar proses kolaborasi berjalan adil dan berkelanjutan.

Dengan ini, Bakesbangpol Kota Bandung telah berupaya menjalankan program dan kebijakan secara terarah melalui, evaluasi rutin, serta koordinasi dengan forum-forum kemasyarakatan seperti FKUB, FKDM, FPK, dan organisasi masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait minimnya pemerataan partisipasi masyarakat dan

rendahnya literasi politik yang menyebabkan belum semua kelompok dapat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi program masih perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan data dan teknologi digital agar lebih transparan dan efisien. Kolaborasi lintas lembaga juga perlu diperkuat agar tidak sekadar formalitas, tetapi menghasilkan keputusan yang benar-benar representatif. Dengan demikian, meskipun arah kebijakan sudah berada pada jalur yang tepat, masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek transparansi, efektivitas, dan kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif masih memerlukan penguatan agar mampu menghasilkan keputusan yang efektif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks tim kerja, kepemimpinan kolaboratif dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas karena adanya ruang bagi anggota tim untuk menyampaikan ide dan berkontribusi secara aktif (Emerson K. &, (2015)). Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada keberlanjutan organisasi. Lebih jauh lagi, kepemimpinan kolaboratif memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan eksternal. Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, organisasi dapat lebih cepat menyesuaikan strategi mereka dalam menghadapi tantangan yang muncul (Heifetz, (2009)). Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah yang signifikan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

Teori kepemimpinan kolaboratif yang dikemukakan oleh (Chrislip, (1994).) sangat relevan dalam memahami dinamika kepemimpinan di lembaga pemerintahan seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung. Dalam teorinya, Chrislip dan Larson menekankan bahwa kepemimpinan kolaboratif bukan hanya bersumber dari otoritas formal atau jabatan struktural, melainkan dari proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan jenis ini bertumpu pada prinsip kolaborasi, dialog terbuka, dan konsensus, yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih inklusif, legitim, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kesbangpol Kota Bandung, yang berperan strategis dalam mengelola isu-isu

kebangsaan, politik, dan hubungan antarormas, pendekatan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk menyatukan berbagai pandangan yang berbeda.

Ketika lembaga ini menghadapi situasi kompleks, seperti merumuskan kebijakan terkait ormas atau menangani potensi konflik sosial, penerapan kepemimpinan kolaboratif memungkinkan proses pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog antar aktor seperti tokoh masyarakat, LSM, aparat keamanan, dan pihak pemerintah sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Chrislip dan Larson bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada kemampuan membangun kepercayaan, mengelola dinamika kelompok, dan mendorong keterlibatan aktif dari seluruh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis dan memahami bagaimana dinamika kepemimpinan kolaboratif terjadi dalam praktik pengambilan keputusan di Kesbangpol Kota Bandung

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan kolaboratif berkembang dalam proses pengambilan keputusan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, terutama dalam hal pola komunikasi, koordinasi, serta interaksi antar pemimpin di dalam lembaga tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan dalam menentukan efektivitas kepemimpinan kolaboratif, baik dari sisi internal seperti budaya organisasi, maupun dari aspek eksternal seperti regulasi, dinamika politik, serta kondisi sosial di Kota Bandung.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kepemimpinan kolaboratif berkontribusi terhadap efektivitas dan kualitas pengambilan keputusan di Kesbangpol, serta bagaimana pendekatan ini berdampak pada kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini juga akan mengungkap berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan kepemimpinan kolaboratif di lingkungan pemerintahan, serta menyusun strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran kepemimpinan kolaboratif dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model kepemimpinan yang lebih inovatif di tingkat pemerintahan

daerah, khususnya dalam konteks Kota Bandung. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam memperkaya wawasan mengenai kepemimpinan kolaboratif, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menerapkan pola kepemimpinan yang lebih responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial serta politik yang terjadi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Pengambilan Keputusan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah antara lain :

1. Perbedaan kepentingan dan persepsi antar pemimpin maupun stakeholder seringkali menimbulkan hambatan dalam mencapai keputusan bersama .
2. Tingkat kepercayaan aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya terbentuk secara konsisten.
3. Kurangnya sinergi antar pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kolaborasi tidak berjalan optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimana inklusivitas dalam pengambilan keputusan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ?
2. Bagaimana komitmen terhadap tujuan bersama dalam pengambilan keputusan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ?
3. Bagaimana kepercayaan dan hubunganyang kuat dalam pengambilan keputusan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ?
4. Bagaimana distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ?

5. Bagaimana komunikasi yang efektif dalam pengambilan keputusan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi inklusivitas dalam pengambilan keputusan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung
2. .Untuk menganalisis dan mengidentifikasi komitmen terhadap tujuan bersama dalam pengambilan keputusan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Poitik Kota Bandung
3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Kepercayaan Dan Hubungan Yang Kuat dalam pengambilan keputusan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung
4. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung
5. Untuk mengidentifikasi komunikasi efektif dalam pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini tentunya dapat memberikan manfaat, salah satunya adalah bermanfaat bagi para pemangku kepentingan baik secara teoritis dan juga secara praktis.

Manfaat Teoretis:

1. Menambah wawasan dan literatur mengenai kepemimpinan kolaboratif di terapkan dalam sektor pemerintahan,khususnya di Tingkat daerah. dalam konteks pengambilan keputusan.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori kepemimpinan dan manajemen organisasi.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan kolaboratif.

Manfaat Praktis:

1. Memberikan panduan bagi pemimpin dalam menerapkan kepemimpinan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.
2. Membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan partisipatif.
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim dalam proses pengambilan keputusan.
4. Mengurangi konflik dalam tim dengan pendekatan kolaboratif yang lebih terbuka dan transparan.
5. Meningkatkan kualitas keputusan melalui pemanfaatan berbagai perspektif dan keahlian anggota tim

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibangun berdasarkan tinjauan pustaka dan pengamatan empiris yang dilakukan tinjauan pustaka memberikan landasan teoritis yang kuat, sementara pengamatan empiris mengarahkan peneliti pada situasi nyata di lapangan (Widayat, 2019). Kerangka berpikir dalam penelitian ini dirancang untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana konsep-konsep yang mendasari implementasi dari kepemimpinan kolaboratif di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung, bekerja dalam kerangka teoritis yang terstruktur dari tahap input, proses, hingga output. Kerangka ini juga berfungsi sebagai alat untuk memahami hubungan antara teori, kebijakan, dan variabel penting dalam implementasi kepemimpinan kolaboratif, sehingga mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dari kepemimpinan kolaboratif.

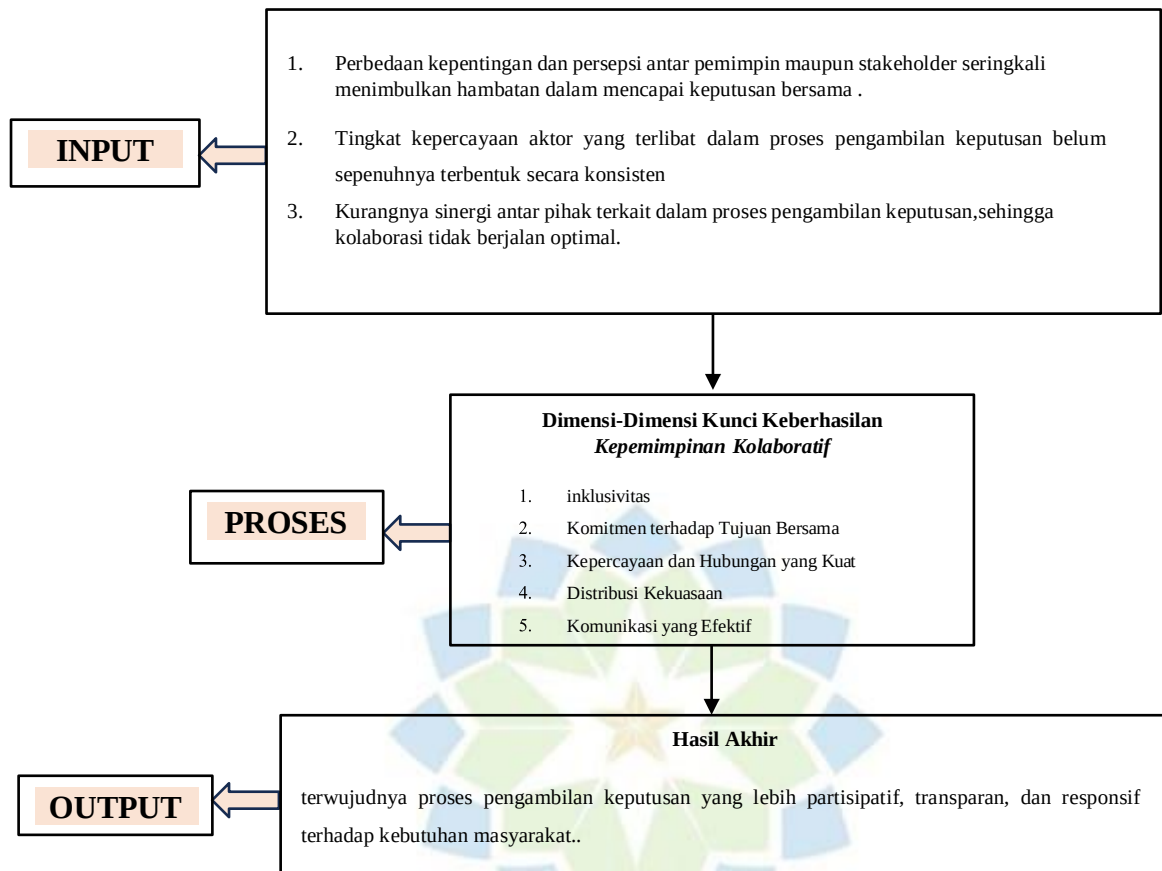
Dalam prosesnya, kepemimpinan kolaboratif dipahami melalui lima dimensi utama, yaitu inklusivitas, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan dan hubungan yang kuat, distribusi kekuasaan, serta komunikasi yang efektif. Inklusivitas tercermin dari keterbukaan pimpinan dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara setara dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi. Komitmen

terhadap tujuan bersama menjadi landasan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda agar tetap berorientasi pada kepentingan publik dan stabilitas sosial. Kepercayaan dan hubungan yang kuat dibangun melalui interaksi yang berkelanjutan, sikap saling menghargai, serta konsistensi dalam tindakan, sehingga menciptakan hubungan kerja sama yang solid antara pemerintah dan masyarakat. Distribusi kekuasaan ditunjukkan melalui pembagian peran dan kewenangan yang proporsional, di mana pimpinan berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengambil keputusan tunggal. Selanjutnya, komunikasi yang efektif menjadi sarana utama dalam menyamakan persepsi, memperlancar koordinasi, serta meminimalkan terjadinya miskomunikasi dalam proses kolaborasi.

Melalui penerapan kelima dimensi tersebut, output atau hasil penelitian diharapkan menunjukkan terwujudnya proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan kolaboratif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta mendukung terciptanya kerukunan dan stabilitas sosial. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, dan inklusif.

Berikut ini adalah kerangka berpikir penelitian yang disusun dalam bentuk diagram alur berbentuk panah, yang mengilustrasikan hubungan antara elemen-

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil Penelitian (Diolah peneliti,2025)



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG